



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONARKU
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 184566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.140.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 130.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10.000 m2/10.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	119.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	52.076.887
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	206.250.805



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.585.127.692
III. HUTANG	Rp.	12.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.573.127.692

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL HALIM
2. Jabatan : WAKIL KEPALA
3. NHK : 451678

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.135.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.135.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	133.000.000
1. MOBIL, HONDA FREED MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT METIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	107.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.642.120
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.401.142.120
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.401.142.120

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JASDAR
2. Jabatan : HAKIM
3. NIK : 183345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.412.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/86 m2 di KAB / KOTA MAGETAN , HASIL SENDIRI Rp. 572.000.000
3. Tanah Seluas 127 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.500.000

1. MOBIL SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR HONDA VARIO MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR YAMAHA LEXY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.900.000



D. SURAT BERHARGA Rp. --

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 48.620.000

F. HARTA LAINNYA Rp. --

Sub Total Rp. 1.725.020.000

III. HUTANG Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.275.020.000



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSUL ARIFIN**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **464666**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 890.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 335.125.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 335.125.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 128.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.184.300.000

III. HUTANG Rp. 612.095.696

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 572.204.304



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADITYA CANDRA CHRISTYAN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 681212

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.470.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	233.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER 1.5L ULTIMATE L 4X2 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	59.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.762.500.000
III. HUTANG	Rp.	380.408.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.382.091.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAIJA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 522258

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	630.000.000
1. Tanah Seluas 527 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 380.000.000		
2. Tanah Seluas 821 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 75.000.000		
3. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 15.000.000		
4. Tanah Seluas 961 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 160.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	31.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SPD MOTOR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, HONDA V1J02Q32L2A/T SPD MOTOR SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.000.000
Sub Total	Rp.	730.500.000
III. HUTANG	Rp.	8.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	722.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHOLIP
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 651461

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.750.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	183.800.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000		
2. MOTOR, YAMAHA R25 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	258.550.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.007.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.212.857.000
III. HUTANG	Rp.	288.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.924.857.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHIM
2. Jabatan : PANITERA MUDA PIDANA
3. NHK : 479444

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	940.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/300 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 510.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/55 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	42.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.037.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.020.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBROTO AJI SAROSO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 856634

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	75.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/150 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.000.000
1. MOBIL, ISUZU TBR 54 STD MOBIL PENUMPANG/ STATION WAGON Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI UK 125 SC AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.093.017
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	181.593.017
III. HUTANG	Rp.	53.723.551
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	127.869.466

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRAYITNO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 930971

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.060.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/923 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 200.060.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	340.960.000
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	310.960.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMI ERAWATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 1037429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	231.000.000
1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN SL410 R Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
4. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.629.603
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	738.129.603
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	738.129.603

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAT SOLIKIN**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **1000303**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 163.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/60 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 710 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. Tanah Seluas 387 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 66.200.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 257.200.000

III. HUTANG

Rp. 156.571.382

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 100.628.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERYANTO**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **1038139**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp. 260.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m ² /45 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp. 76.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000	
2. MOBIL, TOYOTA VIOS LIMO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 2.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 35.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp. ----
Sub Total	Rp. 373.700.000
III. HUTANG	Rp. 366.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 7.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.